MORALITA
JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

# CIVIC ENGAGEMENT GEN Z DALAM DEMOKRASI PANCASILA KONTEMPORER: RELASI ANTARA PARTISIPASI DIGITAL DAN PARTISIPASI KONVENSIONAL

Kenlies Era Rosalina Marsudi [1]*, Bekti Galih Kurniawan [2], Romadhona Kusuma Yudha [3]

[1] UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia
[2] Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
[3] Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
*Corresponding Author*: kenliesmarsudi@uinponorogo.ac.id*

**Article Info**

***Article history:***

Received : 15 September 2026
Accepteance : 08 Oktober 2026
Published : 09 Oktober 2026
Available online
https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index

E-ISSN: 2302-6561

**Cara mengutip:**
Marsudi, R. E. K., Kurniawan, G. B., Yudha, K. R. (2026). CIVIC ENGAGEMENT GEN Z DALAM DEMOKRASI PANCASILA KONTEMPORER: RELASI ANTARA PARTISIPASI DIGITAL DAN PARTISIPASI KONVENSIONAL. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 83-98.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini menganalisis civic engagement Generasi Z dalam demokrasi Pancasila kontemporer, khususnya relasi antara partisipasi digital dan konvensional, melalui tiga lapis kerangka teoretis. Isu ini penting karena Gen Z mencakup 24,94% pemilih Pemilu 2024, sementara ruang demokrasi dipengaruhi algoritma dan disinformasi. Penelitian menggunakan integrative literature review terhadap publikasi ilmiah dan dokumen kelembagaan periode 2020–2026, dengan sintesis tematik berbasis Civic Voluntarism Model dan connective action (mekanisme), tipologi laten-manifes dan orientasi kewargaan (tipologi), serta deliberasi Habermas dan nilai Pancasila (normatif). Hasil menunjukkan bahwa partisipasi digital menjadi pintu masuk berbiaya rendah, tetapi transisinya ke partisipasi konvensional bersifat kondisional pada sumber daya, efikasi politik, dan jaringan rekrutmen. Keterlibatan Gen Z dipetakan sebagai spektrum dari digital observer hingga civic actor dan dinilai melalui indikator deliberatif lima sila. Kajian ini merekomendasikan pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital, deliberasi sipil, dan aksi nyata.*

**Kata Kunci:** *Civic Engagement, Kewarganegaraan Digital, Generasi Z, Demokrasi Pancasila.*

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital telah menggeser cara generasi muda berhubungan dengan isu publik, institusi politik, dan sesama warga negara. Politik tidak lagi berlangsung terutama melalui partai, organisasi kemasyarakatan, rapat publik, atau kampanye tatap muka, tetapi juga melalui media sosial yang memungkinkan warga memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, membangun jejaring, dan merespons isu secara cepat. Dalam perspektif kewarganegaraan, perubahan ini merupakan transformasi repertoar tindakan warga negara, bukan sekadar perpindahan medium komunikasi. Boulianne dan Theocharis (2020) menunjukkan melalui meta-analisis bahwa penggunaan media digital oleh pemuda berhubungan dengan keterlibatan sipil dan politik, termasuk di ranah luring, sedangkan Weiss (2020) menekankan perlunya memperhitungkan bentuk partisipasi baru yang bersifat daring dan ekspresif. Choi (2016) menegaskan bahwa kehidupan kewarganegaraan digital tidak terpisah secara linear dari kehidupan kewarganegaraan luring.

Konteks Indonesia memberikan alasan empiris yang kuat. Komisi Pemilihan Umum (2024) mencatat bahwa pemilih Generasi Z pada Pemilu 2024 berjumlah 50.645.669 orang atau 24,94% dari pemilih dalam negeri, sedangkan generasi milenial mencapai 33,44%, sehingga keduanya bersama-sama membentuk 58,38% pemilih. Proporsi yang besar ini tidak dengan sendirinya menunjukkan kualitas civic engagement. Jumlah pemilih muda perlu diikuti

kemampuan mengolah informasi, berdialog dengan perbedaan, dan menerjemahkan perhatian politik menjadi tindakan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Tantangannya kompleks karena ruang digital bersifat ambivalen. Media sosial memperluas akses informasi dan menurunkan biaya partisipasi, tetapi juga dapat memperkuat disinformasi, polarisasi, dan ruang gema. Kementerian Komunikasi dan Digital (2026) mengingatkan bahwa personalisasi algoritma dapat menciptakan "ilusi algoritma", yakni anggapan bahwa apa yang dominan di lini masa mewakili keseluruhan realitas sosial. Karena itu, kualitas civic engagement Gen Z tidak cukup diukur dari frekuensi penggunaan media sosial, tetapi dari kualitas pengetahuan, pertimbangan kritis, orientasi dialog, dan konsekuensi tindakan.

Penelitian terdahulu umumnya menemukan hubungan positif tetapi tidak seragam antara media digital dan partisipasi politik pemuda (Boulianne, 2020; Boulianne & Theocharis, 2020), termasuk pada Gen Z Indonesia (Stiawan & Chanthoeurn Dock, 2025). Irmayani, Sudarwati, dan Sinaga (2026) menemukan kesenjangan antara perhatian dan keterlibatan berkelanjutan, tetapi relasi digital-konvensional belum disintesiskan dalam kerangka demokrasi Pancasila.

Kerangka Demokrasi Pancasila memberikan dimensi normatif yang penting. Civic engagement tidak hanya soal partisipasi yang tinggi secara kuantitatif, tetapi partisipasi yang selaras dengan martabat manusia, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial (Hidayah, Trihastuti, Hakiki, & Fadli, 2025; Nuruddin, 2021). Wahidin, Utami, Amalia, Aqida, dan Aidah (2025) menunjukkan bahwa demokrasi digital Indonesia membuka peluang transparansi dan partisipasi, sekaligus menghadirkan tantangan literasi,

keamanan, dan regulasi. Tanpa penerjemahan nilai ke dalam indikator yang dapat diamati, Pancasila berisiko hanya hadir sebagai simbol, bukan sebagai kriteria untuk menilai praktik partisipasi warga muda di ruang digital maupun luring.

Satu teori tunggal sulit menjawab seluruh persoalan tersebut. Teori partisipasi politik menjelaskan siapa yang berpartisipasi dan mengapa, tetapi kurang menilai kualitas wacana. Teori demokrasi deliberatif menilai kualitas wacana, tetapi tidak menjelaskan mengapa sebagian warga berpindah dari perhatian ke tindakan. Karena itu, kajian ini memadukan teori yang bekerja pada tiga tingkat analisis: mekanisme perpindahan, bentuk keterlibatan, dan kriteria normatif.

Artikel ini bertujuan menganalisis civic engagement Gen Z dalam demokrasi Pancasila kontemporer dengan fokus pada relasi partisipasi digital dan konvensional. Kebaruan kajian terletak pada penggunaan tiga lapis kerangka teoretis yang jarang dipertemukan: lapis mekanisme (Civic Voluntarism Model dan connective action), lapis tipologi (partisipasi laten-manifes dan tiga tipe warga negara), dan lapis normatif (deliberasi Habermas dan nilai Pancasila). Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana partisipasi digital berhubungan dengan partisipasi konvensional, bentuk keterlibatan apa yang dapat dibedakan, dan bagaimana kualitasnya dinilai dalam kerangka Pancasila.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan integrative literature review karena tujuannya bukan menghitung satu effect size, melainkan mempertemukan temuan konseptual dan empiris dari desain penelitian yang berbeda untuk menjelaskan pola relasi online-offline dalam keterlibatan kewarganegaraan. Pendekatan ini juga memungkinkan literatur dibaca melalui kerangka teori tertentu sehingga sintesis tidak berhenti pada pengelompokan deskriptif.

Penelusuran dilakukan secara purposive terhadap artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen kelembagaan yang tersedia secara daring. Kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris meliputi "Gen Z", "civic engagement", "youth political participation", "digital political participation", "offline political participation", "digital citizenship", "Pancasila democracy", dan "Indonesia". Rentang publikasi utama ialah 2020–2026, dilengkapi karya teori klasik yang menjadi landasan kerangka analisis. Dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Digital digunakan sebagai sumber kontekstual untuk data demografis pemilih dan perkembangan ruang demokrasi digital. Literatur dipilih apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria: membahas generasi muda atau Gen Z; membahas keterlibatan sipil-politik melalui media digital; mengkaji partisipasi daring dan/atau luring; membahas digital citizenship, civic engagement, atau demokrasi Pancasila; serta menyediakan informasi metodologis atau argumen konseptual yang dapat dibandingkan. Publikasi yang hanya membahas penggunaan media sosial untuk tujuan nonkewarganegaraan atau tanpa informasi bibliografis memadai tidak dijadikan sumber inti.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap identifikasi menetapkan literatur sesuai kriteria. Tahap ekstraksi mencatat konteks penelitian, karakteristik subjek, bentuk

partisipasi digital, bentuk partisipasi konvensional, temuan mengenai hubungan keduanya, dan implikasi bagi pendidikan kewarganegaraan. Tahap pengelompokan mengodekan temuan secara deduktif berdasarkan konsep kunci tiga lapis teori (Tabel 1), lalu memperkayanya secara induktif untuk menangkap pola yang tidak tercakup. Tahap sintesis menghasilkan tiga tema: fungsi partisipasi digital sebagai entry point, mekanisme hubungan digital-konvensional, dan Pancasila sebagai kerangka kualitas partisipasi. Keabsahan interpretasi dijaga melalui perbandingan temuan antarstudi dan penggunaan sumber resmi untuk data faktual kontemporer.

Teori berfungsi sebagai lensa sintesis, bukan hipotesis yang diuji. Kajian ini tidak melakukan meta-analisis statistik, tidak mengklaim sebagai systematic review yang eksaustif, dan tidak melibatkan subjek manusia sehingga tidak memerlukan persetujuan etik. Fokusnya ialah membangun kerangka konseptual yang dapat diuji melalui penelitian lapangan berikutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Teoretis Tiga Lapis

Tiga lapis teori dipilih agar masing-masing menjawab satu pertanyaan analitis yang berbeda. Lapis mekanisme menjawab bagaimana partisipasi digital dan konvensional saling terhubung. Lapis tipologi menjawab bentuk keterlibatan apa yang sedang dibicarakan. Lapis normatif menjawab seperti apa kualitas keterlibatan yang diharapkan dalam demokrasi Indonesia. Tabel 1 merangkum ketiganya.

**Tabel 1.** Kerangka Teoretis Tiga Lapis

| Lapis | Teori | Konsep kunci | Fungsi analitis |
|---|---|---|---|
| **Mekanisme** | Civic Voluntarism Model (Verba et al., 1995) | Sumber daya, motivasi psikologis (minat, efikasi), jaringan rekrutmen | Menjelaskan mengapa relasi digital-luring bersifat kondisional |
| | Connective action (Bennett & Segerberg, dalam Ahmad & Setyawati, 2024) | Personalisasi, jejaring digital, peran organisasi | Menjelaskan cara koordinasi partisipasi digital Gen Z |
| **Tipologi** | Political participation dan civic engagement (Ekman & Amnå, dalam Malafaia et al., 2021) | Partisipasi laten dan manifes | Memetakan posisi aktivitas dalam spektrum keterlibatan |
| | Tiga tipe warga negara (Westheimer & Kahne, 2004) | Personally responsible, participatory, justice-oriented | Menilai orientasi kewargaan di balik aktivitas |
| **Normatif** | Demokrasi deliberatif (Habermas, 1996, 2006) | Ruang publik, inklusi, timbal balik argumen, pemahaman bersama | Menilai kualitas komunikasi politik |

| Lapis | Teori | Konsep kunci | Fungsi analitis |
|---|---|---|---|
| | Nilai Pancasila (Fatlolon, 2022) | Lima sila sebagai etika publik | Menurunkan indikator kualitas partisipasi |

**Sumber:** Diolah penulis berdasarkan literatur yang ditelaah (2026).

Pada lapis mekanisme, Civic Voluntarism Model menjelaskan partisipasi sebagai hasil tiga faktor: sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan sipil; motivasi psikologis seperti minat dan efikasi politik; serta jaringan rekrutmen yang mengajak orang bertindak (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Brady, Verba, dan Schlozman (1995) menekankan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menahan partisipasi meskipun motivasi ada. Zumárraga-Espinosa, Silva-Valdivieso, dan Trujillo-Sánchez (2020) menerapkan model ini pada penggunaan politik Facebook, sehingga relevan untuk menafsirkan hubungan digital-luring. Connective action melengkapinya dengan membedakan logika aksi kolektif yang bertumpu pada organisasi dan identitas kelompok dari logika aksi konektif yang bertumpu pada personalisasi dan pertukaran konten melalui jaringan digital (Bennett & Segerberg, dalam Ahmad & Setyawati, 2024). Dengan lensa ini, partisipasi Gen Z yang tampak cair tidak otomatis dianggap lemah, tetapi dibaca sebagai bentuk koordinasi yang berbeda, dengan peran organisasi pada derajat yang bervariasi.

Pada lapis tipologi, Ekman dan Amnå (dalam Malafaia et al., 2021) membedakan partisipasi manifes, yakni tindakan politik yang tampak seperti memilih, bergabung dengan partai, menandatangani petisi, atau berdemonstrasi, dari partisipasi laten yang mencakup perhatian, minat, dan keterlibatan sosial-sipil yang berpotensi menjadi tindakan. Pembedaan ini mencegah perhatian pada isu publik diabaikan hanya karena belum tampak sebagai aksi. Westheimer dan Kahne (2004) menambahkan pertanyaan kualitatif tentang jenis warga negara yang dibentuk: personally responsible, participatory, atau justice-oriented. Keduanya saling melengkapi karena Ekman dan Amnå menjawab seberapa tampak sebuah tindakan, sedangkan Westheimer dan Kahne menjawab ke arah mana tindakan itu berorientasi.

Pada lapis normatif, teori demokrasi deliberatif Habermas menempatkan legitimasi pada proses wacana publik ketika warga saling memberikan alasan dan terbuka terhadap pertimbangan lain (Habermas, 1996). Konsep ruang publik (Habermas, 1962/1989) menunjukkan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada kondisi komunikasi, dan Habermas (2006) menegaskan dimensi epistemik komunikasi politik dalam masyarakat media. Teori ini bersifat prosedural-komunikatif. Pancasila menambahkan dimensi substantif karena, sebagaimana ditunjukkan Fatlolon (2022), prinsip deliberatif yang tertanam di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk melembagakan proses demokratisasi di Indonesia. Kombinasi keduanya memungkinkan kualitas partisipasi dinilai dari cara berkomunikasi sekaligus nilai yang dituju.

Setiap teori memiliki batas yang perlu disadari. Civic Voluntarism Model dikembangkan dalam konteks politik Amerika Serikat sehingga peran sumber daya dan rekrutmen perlu dibaca kontekstual di Indonesia, yang memiliki organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan sebagai jaringan rekrutmen. Connective action menjelaskan koordinasi berbasis jaringan, tetapi tidak

dengan sendirinya menilai kualitas isi tindakan. Tipologi laten-manifes Ekman dan Amnå (dalam Malafaia et al., 2021) merupakan alat klasifikasi, bukan penjelasan kausal. Habermas berangkat dari tradisi rasionalitas komunikatif Eropa, sedangkan musyawarah dalam Pancasila memuat orientasi pada mufakat dan kebersamaan. Pemaduan tiga lapis berusaha menutup keterbatasan itu: lapis mekanisme dan tipologi menjelaskan bagaimana dan siapa, sedangkan lapis normatif menilai bagaimana seharusnya.

## Posisi Gen Z dalam Ekologi Demokrasi Indonesia

Posisi Gen Z dalam demokrasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan ekologi informasi. Dengan 24,94% pemilih dalam negeri (Komisi Pemilihan Umum, 2024), Gen Z perlu dipahami sebagai aktor kewarganegaraan yang berinteraksi dengan politik melalui banyak kanal, bukan semata pemilih pemula. Hariyanti et al. (2026) menunjukkan bahwa Gen Z di Pekanbaru memakai media sosial sebagai sumber informasi politik, sarana komunikasi, dan ruang ekspresi. Namun akses digital tidak sama dengan keterlibatan substantif: konsumsi informasi dapat berhenti sebagai perhatian tanpa berkembang menjadi ekspresi, deliberasi, atau tindakan bersama.

Dari lensa Civic Voluntarism Model, literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi dapat dibaca sebagai keterampilan sipil kontemporer yang tersebar tidak merata. Dari lensa Habermas, lingkungan informasi yang dipersonalisasi mengancam syarat ruang publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (2026) memperingatkan bahwa algoritma dapat membuat potongan realitas tampak dominan, sehingga warga muda dapat sangat aktif secara komunikatif tetapi tetap berada dalam ruang informasi yang homogen.

Konteks ini membuat pertanyaan penelitian bergeser. Pertanyaannya bukan lagi apakah Gen Z aktif atau apatis, melainkan dalam bentuk apa mereka terlibat, melalui jalur apa keterlibatan itu berkembang, dan dengan kualitas seperti apa. Saud dan Margono (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi digital di Indonesia membuka kanal partisipasi baru bagi pemuda, sehingga keterlibatan digital perlu diperlakukan sebagai bagian sah dari repertoar kewarganegaraan. Pada saat yang sama, tantangan literasi dan keamanan yang dicatat Wahidin et al. (2025) menunjukkan bahwa kanal baru tersebut tidak otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas.

## Lapis Mekanisme: Digital sebagai Entry Point dan Relasinya dengan Partisipasi Konvensional

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa partisipasi digital menurunkan hambatan awal untuk terlibat. Boulianne dan Theocharis (2020), melalui meta-analisis terhadap 106 studi berbasis survei, menemukan sedikit bukti bahwa penggunaan media digital merusak keterlibatan pemuda. Dampak positifnya bergantung pada penggunaan yang langsung bersifat politis, seperti membaca berita daring dan berdiskusi politik secara daring, dan aktivitas tersebut berkonsekuensi pada partisipasi luring seperti menghubungi pejabat, menjadi relawan, dan berunjuk rasa. Weiss (2020) juga menegaskan bahwa kajian partisipasi politik pemuda perlu memperhitungkan modus partisipasi baru yang makin umum, termasuk yang bersifat daring dan ekspresif. Aktivitas digital karena itu tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai hiburan atau konsumsi informasi.

Bukti Indonesia mendukung pola tersebut. Stiawan dan Chanthoeurn Dock (2025) menemukan korelasi positif antara intensitas penggunaan media sosial dan partisipasi politik Gen Z ($r = 0{,}622$; $p < 0{,}05$), dengan intensitas menjelaskan 38,7% variasi partisipasi. Achmad dan Hayu Dwimawanti (2024) menemukan hubungan kuat pada Gen Z Jawa Tengah dalam Pemilu 2024. Sobari (2026) memperlihatkan prototipe kewarganegaraan digital Gen Z yang tidak berhenti pada penyebaran konten, tetapi mengarah pada akses informasi kandidat, aspirasi publik, forum diskusi, dan mobilisasi sebaya. Korelasi tersebut tidak berarti bahwa semakin sering seseorang menggunakan media sosial maka ia otomatis menjadi warga negara yang lebih aktif.

Hariyanti et al. (2026) mengidentifikasi tiga fungsi media sosial pada Gen Z, yaitu sumber informasi, medium komunikasi politik, dan ruang ekspresi. Fungsi-fungsi itu membentuk gradasi: pada tingkat pertama Gen Z mengakses informasi dan mengikuti akun politik, pada tingkat kedua masuk ke percakapan publik melalui komentar dan diskusi, dan pada tingkat ketiga berekspresi lebih aktif melalui berbagi informasi, membuat konten, melapor, atau berkampanye isu. Gradasi ini menunjukkan bahwa label aktif di media sosial terlalu umum untuk menjelaskan civic engagement. Oden dan Porter (2023) menambahkan bahwa media sosial berkorelasi dengan keterlibatan sipil daring dan luring, tetapi dampaknya terhadap polarisasi berbeda menurut platform, sehingga manfaat dan risiko ruang digital berjalan bersamaan.

Civic Voluntarism Model menjelaskan mengapa transisi dari digital ke konvensional tidak otomatis. Zumárraga-Espinosa et al. (2020) menerapkan model ini pada partisipasi politik di Facebook dan menemukan bahwa sikap politik, emosi, dan upaya rekrutmen memengaruhi penggunaan politik platform tersebut, sedangkan ketersediaan sumber daya bukan prediktor yang signifikan, sehingga bobot masing-masing faktor perlu dibaca kontekstual. Barati (2023) menemukan bahwa pengaruh media sosial bergantung pada cara penggunaannya. Boulianne (2020) dan Verma, Gardia, dan Das (2026) menunjukkan hubungan yang cenderung positif tetapi heterogen. Dalam kerangka tiga faktor tersebut, heterogenitas itu dapat dibaca sebagai variasi sumber daya (literasi dan waktu), motivasi (efikasi politik), dan kesempatan direkrut ke organisasi atau komunitas.

Connective action menambahkan penjelasan tentang bentuk koordinasi. Gen Z cenderung bergerak melalui jejaring personal dan konten yang dibagikan (Bennett & Segerberg, dalam Ahmad & Setyawati, 2024), yang menurunkan biaya partisipasi tetapi sering kehilangan jangkar organisasi yang menjaga keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan concern-to-participation gap yang ditemukan Irmayani et al. (2026) pada 922 mahasiswa: media sosial menjadi sumber utama informasi sosial-politik, tetapi keterlibatan teratur dan terlembaga lebih terbatas. Kesenjangan menyempit ketika organisasi, kampus, atau komunitas menyediakan ruang rekrutmen dan tindakan bersama. Pada kampanye "No Viral No Action" di Jakarta, Ahmad dan Setyawati (2024) menemukan bahwa jejaring swa-organisasi mampu memviralkan isu, sementara informan studi tersebut menekankan perlunya aktivasi komunitas luring agar kampanye tidak berhenti pada viralitas. Tarsidi, Bramastia, Triyanto, Rawanoko, dan Winarno (2026) pun mencatat bahwa keterlibatan generasi digital dapat berhenti pada bentuk simbolik tanpa pengalaman aksi nyata. Tabel 2 merangkum temuan kunci yang dibaca melalui lapis mekanisme.

**Tabel 2.** Sintesis Temuan Kunci Berdasarkan Lapis Mekanisme

| Sumber | Temuan kunci | Dibaca melalui |
|---|---|---|
| Zumárraga-Espinosa et al. (2020) | Sikap politik, emosi, dan rekrutmen memengaruhi partisipasi politik di Facebook; sumber daya bukan prediktor signifikan. | Civic Voluntarism Model |
| Barati (2023) | Pengaruh media sosial terhadap partisipasi daring dan luring bergantung pada bentuk penggunaan. | Connective action |
| Boulianne (2020) | Efek media digital cenderung positif tetapi bervariasi menurut konteks dan jenis aktivitas. | Civic Voluntarism Model |
| Stiawan & Chanthoeurn Dock (2025) | Korelasi positif intensitas media sosial dan partisipasi politik Gen Z (r = 0,622). | Entry point digital |
| Hariyanti et al. (2026) | Media sosial berfungsi sebagai sumber informasi, medium komunikasi, dan ruang ekspresi. | Gradasi partisipasi |
| Irmayani et al. (2026) | Ada kesenjangan antara perhatian pada isu dan partisipasi yang rutin dan terlembaga. | Jaringan rekrutmen |
| Verma et al. (2026) | Meta-analisis 21 studi: hubungan positif tingkat menengah dengan heterogenitas tinggi. | Civic Voluntarism Model |
| Tarsidi et al. (2026) | Keterlibatan digital dapat berhenti simbolik tanpa pengalaman aksi nyata. | Peran organisasi |

**Sumber:** Diolah penulis berdasarkan literatur yang ditelaah (2026).

Temuan-temuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga model relasi. Model substitusi menganggap aktivitas digital menggantikan partisipasi konvensional; model ini kurang didukung karena studi yang ditelaah menunjukkan hubungan positif, bukan hubungan yang saling meniadakan. Model mobilisasi menganggap aktivitas digital mendorong partisipasi konvensional; model ini didukung secara bersyarat, yakni ketika sumber daya, efikasi, dan jaringan rekrutmen tersedia. Model hibridisasi menganggap keduanya saling memperkaya dalam satu ekosistem; model inilah yang paling konsisten dengan keragaman temuan, termasuk heterogenitas tinggi pada meta-analisis Verma et al. (2026).

Dengan demikian, hubungan digital-konvensional lebih tepat dipahami sebagai hibridisasi daripada substitusi atau mobilisasi sederhana. Aktivitas digital dapat menjadi pintu masuk, dan pengalaman organisasi dapat memperkaya aktivitas digital melalui pengetahuan, jejaring, dan efikasi. Yang penting bukan perpindahan linear dari daring ke luring, melainkan sirkulasi pengalaman kewarganegaraan di antara keduanya.

## Lapis Tipologi: Spektrum Civic Engagement Gen Z

Pembedaan laten-manifes Ekman dan Amnå (dalam Malafaia et al., 2021) sejalan dengan literatur Indonesia yang menegaskan bahwa civic engagement tidak identik

dengan partisipasi elektoral. Nuruddin (2021) menempatkan keterlibatan warga dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, teknologi, sosial, dan budaya. Saud (2020) menunjukkan peran sosialisasi kewarganegaraan melalui sekolah, keluarga, teman, dan lingkungan, sedangkan Saud dan Margono (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi digital membuka kanal baru partisipasi politik anak muda. Memilih dalam pemilu adalah satu bentuk partisipasi manifes formal, tetapi Gen Z juga terlibat dalam kampanye isu lingkungan, penggalangan dana, advokasi kebijakan, atau produksi konten edukasi publik tanpa masuk ke organisasi politik.

Berdasarkan pembedaan tersebut, kajian ini mengusulkan tipologi empat tingkat yang memadukan posisi laten-manifes (Ekman & Amnå, dalam Malafaia et al., 2021) dengan orientasi kewargaan (Westheimer & Kahne, 2004). Digital observer terutama mengonsumsi informasi politik. Digital expresser menyukai, membagikan, berkomentar, atau membuat konten, tetapi keterlibatan di luar ruang digital terbatas. Hybrid participant menghubungkan aktivitas digital dengan komunitas, forum, relawan, atau advokasi. Civic actor mengintegrasikan pengetahuan, ekspresi, jejaring, deliberasi, dan tindakan kolektif secara berkelanjutan. Tabel 3 menyajikan pemetaannya.

**Tabel 3.** Tipologi Civic Engagement Gen Z Berdasarkan Dua Teori

| Tipologi | Posisi (laten-manifes) | Orientasi (Westheimer & Kahne) | Contoh aktivitas |
|---|---|---|---|
| Digital observer | Laten: perhatian dan minat | Cenderung personally responsible | Mengikuti akun dan berita politik |
| Digital expresser | Laten menuju manifes ekstra-parlementer daring | Personally responsible atau participatory | Berkomentar, berbagi, membuat konten |
| Hybrid participant | Manifes: daring dan luring saling terkait | Participatory | Relawan, forum kampus, advokasi |
| Civic actor | Manifes berkelanjutan, formal dan non-formal | Participatory dan justice-oriented | Deliberasi, pengawasan kebijakan, aksi komunitas |

**Sumber:** Sintesis penulis berdasarkan Ekman & Amnå (dalam Malafaia et al., 2021) dan Westheimer & Kahne (2004).

Posisi digital observer perlu dibaca secara adil. Dalam kerangka Ekman dan Amnå (dalam Malafaia et al., 2021), perhatian dan minat politik merupakan partisipasi laten yang dapat menjadi dasar tindakan di kemudian hari, sehingga mengikuti isu publik tidak boleh dianggap kosong. Namun, jika tidak disertai keterampilan memeriksa informasi, posisi ini rentan terhadap ilusi algoritma. Digital expresser menunjukkan ekspresi yang lebih aktif, tetapi sebagaimana dicatat Tarsidi et al. (2026), keterlibatan generasi digital dapat berhenti pada bentuk simbolik. Dalam istilah Westheimer dan Kahne (2004), ekspresi yang berfokus pada tindakan pribadi yang bertanggung jawab berbeda dari ekspresi yang diarahkan pada kerja bersama.

Hybrid participant adalah titik temu yang paling penting bagi kajian ini karena aktivitas digitalnya terhubung dengan komunitas, forum, relawan, atau advokasi, sehingga pengalaman daring dan luring saling memperkuat. Civic actor merupakan bentuk yang

paling terintegrasi, ketika pengetahuan, jejaring, deliberasi, dan tindakan kolektif berlangsung berkelanjutan dan berorientasi pada persoalan struktural, yang dalam istilah Westheimer dan Kahne (2004) mendekati orientasi justice-oriented. Karena civic engagement tidak identik dengan partisipasi elektoral, seseorang yang rutin menggalang bantuan sosial atau mengadvokasi isu lokal dapat menjadi civic actor tanpa terlibat dalam partai politik.

Tipologi ini bukan penilaian baik dan buruk, melainkan alat analitis yang menunjukkan bahwa keterlibatan bersifat berjenjang dan dinamis. Seseorang dapat menjadi hybrid participant pada isu tertentu dan digital observer pada isu lain. Pemetaan orientasi pada Tabel 3 bersifat indikatif dan perlu diuji dengan data primer.

## Lapis Normatif: Deliberasi Habermas dan Nilai Pancasila

Lapis normatif menjawab persoalan yang tidak dapat dijawab oleh lapis lain: partisipasi yang tinggi dan hibrid belum tentu berkualitas demokratis. Algoritma yang menciptakan ilusi dominasi opini (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2026a), hoaks dan polarisasi (Wahidin et al., 2025), serta perbedaan dampak polarisasi antarplatform (Oden & Porter, 2023) menunjukkan bahwa ruang digital dapat memperkuat sekaligus merusak syarat deliberasi. Dari sudut Habermas (1996, 2006), kualitas partisipasi ditentukan oleh inklusi, kesediaan memberi dan menguji alasan, serta orientasi pada pemahaman bersama, bukan oleh viralitas atau agregasi suka.

Pancasila menurunkan kriteria deliberatif tersebut menjadi nilai-nilai yang substantif. Sila keempat paling dekat dengan deliberasi Habermas karena menekankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Namun Pancasila mencakup lebih banyak: etika ekspresi (sila pertama), martabat manusia (sila kedua), dialog lintas kelompok (sila ketiga), dan orientasi pada kepentingan publik (sila kelima). Hidayah et al. (2025) menegaskan bahwa civic engagement berbasis Pancasila berkaitan dengan kesadaran konstitusional dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Choi (2016) menawarkan kerangka digital citizenship yang mencakup etika, literasi media dan informasi, partisipasi, dan critical resistance, yang kompatibel dengan indikator ini, dan Stellmann dan Song (2024) menunjukkan bahwa digital citizenship dipahami sebagai kumpulan elemen yang tidak hanya teknis. Tabel 4 menurunkan indikator kualitas partisipasi digital dan konvensional.

**Tabel 4.** Indikator Kualitas Partisipasi Berdasarkan Deliberasi Habermas dan Pancasila

| Sila | Prinsip normatif dan kriteria deliberatif | Indikator partisipasi digital | Indikator partisipasi konvensional |
|---|---|---|---|
| Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa | Etika dan kejujuran dalam ekspresi (sincerity) | Tidak menyebar fitnah dan manipulasi | Kampanye dan advokasi jujur dan beretika |
| Sila 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab | Penghormatan martabat dan kesetaraan lawan bicara | Merespons berbeda pendapat tanpa merendahkan | Memberi ruang bicara setara dalam forum |

| Sila | Prinsip normatif dan kriteria deliberatif | Indikator partisipasi digital | Indikator partisipasi konvensional |
|---|---|---|---|
| Sila 3: Persatuan Indonesia | Inklusi dan dialog lintas kelompok | Menjembatani, bukan memperkuat segmentasi | Kolaborasi lintas organisasi dan komunitas |
| Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan | Timbal balik argumen dan orientasi pada pemahaman bersama | Berargumen berbasis bukti dan memeriksa sumber | Musyawarah, rapat, dan forum deliberatif |
| Sila 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia | Orientasi pada kepentingan publik | Kampanye isu publik dan pengawasan kebijakan | Relawan, advokasi, dan aksi komunitas berkelanjutan |

**Sumber:** Sintesis penulis berdasarkan Habermas (1996, 2006), Fatlolon (2022), dan Choi (2016).

Tabel 4 menunjukkan bahwa sila-sila Pancasila dapat dioperasionalkan pada dua arena sekaligus, sehingga standar kualitas yang sama dapat dipakai untuk menilai komentar di media sosial maupun musyawarah di forum kampus atau organisasi. Pemaduan Habermas dengan Pancasila juga memerlukan kehati-hatian. Habermas menekankan kekuatan argumen yang lebih baik dalam situasi komunikasi yang setara, sedangkan musyawarah dalam Pancasila memuat orientasi pada mufakat, kebersamaan, dan tanggung jawab moral. Kajian ini memperlakukan keduanya sebagai pelengkap: Habermas menyediakan kriteria prosedural yang dapat diamati, sementara Pancasila memberi arah nilai yang menjaga agar deliberasi tidak berhenti pada kemenangan argumen, tetapi mengarah pada persatuan dan keadilan sosial.

## Integrasi Kerangka Konseptual dan Proposisi

Ketiga lapis dapat diintegrasikan ke dalam satu alur (Gambar 1): akses informasi digital, ekspresi dan interaksi, efikasi serta jejaring kewarganegaraan, partisipasi hibrid, dan civic action berbasis Pancasila. Lapis mekanisme menjelaskan transisi antartahap, lapis tipologi menamai posisi warga di sepanjang alur, dan lapis normatif menjadi kriteria untuk menilai apakah setiap tahap berkualitas demokratis. Alur ini tidak linear dan tidak terjadi pada setiap individu

SHAPE * MERGEFORMAT




**Gambar 1.** Kerangka konseptual relasi civic engagement Gen Z antara partisipasi digital dan partisipasi konvensional.

Dari kerangka tersebut dirumuskan empat proposisi untuk diuji penelitian lapangan. Pertama, transisi dari digital expresser ke hybrid participant lebih mungkin terjadi pada Gen Z yang memiliki efikasi politik dan keterampilan sipil yang lebih tinggi. Kedua, keterhubungan dengan organisasi atau komunitas memperkuat transisi tersebut karena menyediakan jaringan rekrutmen. Ketiga, literasi digital dan kemampuan deliberasi memoderasi dampak personalisasi algoritma terhadap kualitas ekspresi. Keempat, partisipasi yang memenuhi indikator lima sila lebih mungkin berkembang menjadi civic action berkelanjutan dibanding partisipasi yang berhenti pada visibilitas. Proposisi pertama dan kedua diturunkan dari Civic Voluntarism Model dan connective action, proposisi ketiga dari lapis tipologi dan normatif, dan proposisi keempat dari lapis normatif. Pengujiannya dapat memakai survei dengan indikator efikasi, literasi digital, keterlibatan organisasi, dan skala kualitas partisipasi yang diturunkan dari Tabel 4, atau studi kasus untuk menelusuri bagaimana individu berpindah antartipologi pada isu tertentu.

## Implikasi bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Implikasi utamanya adalah reposisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pengetahuan normatif menuju pengembangan digital civic competence dan pengalaman civic action. Saud (2020) menunjukkan pentingnya sosialisasi kewarganegaraan, sedangkan Sobari (2026) memperlihatkan bahwa Gen Z mampu menghasilkan inovasi kewarganegaraan digital yang berorientasi pada informasi dan deliberasi. Pembelajaran dapat dikembangkan dalam tiga tahap yang selaras dengan tiga lapis teori. Tahap pertama

adalah critical civic literacy, yaitu memeriksa sumber, mengenali bias, memahami cara kerja algoritma, dan membedakan fakta, opini, serta propaganda, yang memperkuat sumber daya dan keterampilan sipil. Tahap kedua adalah digital civic deliberation, yaitu berargumentasi secara etis dan mendengar perspektif berbeda berdasarkan kriteria deliberatif dan nilai Pancasila. Tahap ketiga adalah civic action, yaitu menghubungkan isu digital dengan proyek komunitas, advokasi berbasis data, relawan, atau forum partisipasi publik yang menyediakan jaringan rekrutmen.

Tabel 4 dapat dipakai sebagai dasar rubrik asesmen yang menilai kualitas partisipasi, bukan hanya jumlah aktivitas. Dosen atau guru dapat meminta peserta didik mendokumentasikan satu isu publik dari tahap perhatian sampai tindakan, lalu menilai apakah argumennya berbasis bukti, apakah ia mendengar pandangan lain, dan apakah tindakannya berorientasi pada kepentingan publik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Tarsidi et al. (2026) bahwa pengalaman nyata diperlukan agar keterlibatan generasi digital tidak berhenti pada simbol.

Media sosial dengan demikian bukan ancaman yang harus dijauhi, melainkan ruang kewarganegaraan yang dikelola secara kritis, sedangkan partisipasi tatap muka menjadi arena untuk menguji apakah perhatian digital dapat menjadi kerja kolektif. Kementerian Komunikasi dan Digital (2026b) juga mendorong generasi muda agar tidak menjadi konsumen pasif informasi, tetapi menjaga ruang digital tetap kritis dan produktif.

## 4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa civic engagement Gen Z dalam demokrasi Pancasila kontemporer berlangsung dalam ekosistem partisipasi yang semakin hibrid. Melalui lapis mekanisme, partisipasi digital terbukti berfungsi sebagai entry point berbiaya rendah, tetapi transisinya ke partisipasi konvensional bersifat kondisional karena bergantung pada sumber daya, efikasi politik, jaringan rekrutmen, dan peran organisasi, sebagaimana dijelaskan Civic Voluntarism Model dan connective action.

Melalui lapis tipologi, keterlibatan Gen Z dapat dipetakan sebagai spektrum dari digital observer, digital expresser, hybrid participant, hingga civic actor, dengan memadukan pembedaan laten-manifes Ekman dan Amnå serta orientasi kewargaan Westheimer dan Kahne. Melalui lapis normatif, deliberasi Habermas dan lima sila Pancasila menyediakan kriteria untuk menilai kualitas, bukan hanya intensitas, partisipasi. Dengan demikian, penguatan civic engagement perlu bergerak dari digital engagement menuju civic action tanpa memisahkan ruang digital dan konvensional secara kaku.

Secara akademik, kajian ini memberi kontribusi konseptual berupa kerangka tiga lapis dan empat proposisi yang dapat diuji. Keterbatasannya adalah dasar kajian pada literatur sehingga kerangka belum diuji dengan data primer. Penelitian lanjutan perlu menguji proposisi tersebut dengan membandingkan Gen Z menurut tingkat efikasi politik, literasi digital, keterlibatan organisasi, dan pengalaman partisipasi komunitas. Bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hasil kajian mendukung pengintegrasian literasi digital kritis, deliberasi sipil, dan pengalaman aksi nyata dalam pembelajaran.

Kajian ini juga tidak menyatakan bahwa Gen Z lebih aktif atau kurang aktif dibanding generasi lain. Yang dihasilkan adalah pemahaman bahwa bentuk civic engagement sedang berubah dan perlu dibaca melalui hubungan lintas ruang digital dan konvensional, dengan Pancasila sebagai kerangka nilai yang menjaga agar perubahan itu bergerak menuju partisipasi yang kritis, inklusif, deliberatif, dan bertanggung jawab.

## REFERENSI

Achmad, F., & Hayu Dwimawanti, I. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Journal of Management and Public Policy, 1(1), 975–990. https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49755

Ahmad, Y. T., & Setyawati, L. (2024). Digital activism and collective identity: "No Viral No Action" as connective action among youth on Jakarta's air pollution issue. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 33(1), 15–34. https://doi.org/10.17509/jpis.v33i1.69582

Barati, M. (2023). Casual social media use among the youth: Effects on online and offline political participation. JeDEM: eJournal of eDemocracy and Open Government, 15(1), 1–21. https://doi.org/10.29379/jedem.v15i1.738

Boulianne, S. (2020). Twenty years of digital media effects on civic and political participation. Communication Research, 47(7), 947–966. https://doi.org/10.1177/0093650218808186

Boulianne, S., & Theocharis, Y. (2020). Young people, digital media, and engagement: A meta-analysis of research. Social Science Computer Review, 38(2), 111–127. https://doi.org/10.1177/0894439318814190

Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A resource model of political participation. American Political Science Review, 89(2), 271–294. https://doi.org/10.2307/2082425

Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. Theory & Research in Social Education, 44(4), 565–607. https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549

Fatlolon, C. (2022). Toward the deepening of democracy in Indonesia: Assessing the prospects and problems from a Habermasian perspective. Budhi: A Journal of Ideas and Culture, 26(2), Article 3. https://archium.ateneo.edu/budhi/vol26/iss2/3

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society (T. Burger, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962)

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy (W. Rehg, Trans.). MIT Press.

Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, 16(4), 411–426. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x

Hariyanti, H., Darmawan, C., Rahmat, R., Anggraeni, L., Rafni, A., Radini, R., & Hasibuan, H. A. (2026). Social media: A means of developing Generation Z's political participation in the digital era. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 23(1), 80–95. https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90231

Hidayah, Y., Trihastuti, M., Hakiki, M., & Fadli, R. (2025). Penguatan civic engagement berbasis Pancasila untuk membangun kesadaran konstitusional menuju warga negara yang baik dan berkelanjutan pada era digital. Jurnal Studi Sosial, 13(1). https://doi.org/10.23960/jss.v13i1.31573

Irmayani, T., Sudarwati, L., & Sinaga, R. (2026). Generation Z's digital civic engagement and welfare-oriented participation: Evidence from an Indonesian university. Women, Education, and Social Welfare, 3(2), 625–641. https://doi.org/10.70211/wesw.v3i2.512

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026a, June 18). Generasi muda diminta kritis hadapi ilusi algoritma di media sosial. https://djkpm.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/280/generasi-muda-diminta-kritis-hadapi-ilusi-algoritma-di-media-sosial

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026b, July 11). Wamen Nezar Patria ajak generasi muda bangun dynamic democracy di era digital. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10390

Komisi Pemilihan Umum. (2024). Lembar fakta KPU: Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 dan hasil Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Malafaia, C., Ferreira, P. D., & Menezes, I. (2021). Democratic citizenship-in-the-making: Dis/engagement profiles of Portuguese youth. Frontiers in Political Science, 3, Article 743428. https://doi.org/10.3389/fpos.2021.743428

Nuruddin, N. (2021). Keterlibatan warga negara (civic engagement) dalam negara demokrasi: Implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, 13(1), 21–40. https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3986

Oden, A., & Porter, L. (2023). The kids are online: Teen social media use, civic engagement, and affective polarization. Social Media + Society, 9(3), 1–12. https://doi.org/10.1177/20563051231186364

Saud, M. (2020). Civic engagement, youth socialisation and participation in public spheres in Indonesia. Children and Youth Services Review, 119, 105669. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105669

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. Journal of Information Technology & Politics, 18(4), 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Sobari, W. (2026). Reimagining citizenship in electoral times: Lessons from Gen Z's digital civics prototypes for Indonesia's 2024 election. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 23(1), 1–17. https://doi.org/10.21831/jc.v23i1.90563

Stellmann, E., & Song, L. (2024). Essential elements of digital citizenship: Insights from the literature. TechTrends, 68(4), 749–760. https://doi.org/10.1007/s11528-024-00985-8

Stiawan, A., & Chanthoeurn Dock. (2025). Intensity of social media use and political participation of Generation Z in Indonesia: A correlational analysis. International Journal of Geography, Social, and Multicultural Education, 3(2), 46–58. https://doi.org/10.26740/ijgsme.v3n2.p46-58

Tarsidi, D. Z., Bramastia, B., Triyanto, T., Rawanoko, E. S., & Winarno, W. (2026). Wisata Kampus Benteng Pancasila sebagai ruang penguatan civic engagement generasi digital. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 13(2), 115–132. https://doi.org/10.32493/jurnalpkn.v13i2.62794

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American politics. Harvard University Press.

Verma, S., Gardia, A., & Das, B. (2026). A meta-analytic review of social media usage and political participation among youth. International Journal of Educational Research, 137, 102950. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2026.102950

Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Opportunities and challenges of digital democracy in Indonesia. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 20–34. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.723

Weiss, J. (2020). What is youth political participation? Literature review on youth political participation and political attitudes. Frontiers in Political Science, 2, Article 1. https://doi.org/10.3389/fpos.2020.00001

Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237–269. https://doi.org/10.3102/00028312041002237

Zumárraga-Espinosa, M., Silva-Valdivieso, L., & Trujillo-Sánchez, A. (2020). Determinantes del uso político de Facebook en Ecuador: Actitudes, reclutamiento y emociones [Determinants of the political use of Facebook in Ecuador: Attitudes, recruitment and emotions]. América Latina Hoy, 86, 79–102. https://doi.org/10.14201/alh.18564